

Merisaukan Budaya Transaksional

Beberapa hari yang lalu, saya ketemu seorang yang baru saja memenangkan pemilihan kepala desa. Anehnya, ia bukannya gembira, tetapi justru mengeluh. Uangnya habis untuk membiayai pencalonannya itu. Menurut pengakuannya, tidak kurang dari Rp. 500.000,000,- habis dibelanjakan untuk kegiatan itu. Biaya sebesar itu belum termasuk ongkos-ongkos lainnya, seperti untuk syukuran dan lain-lain.

Untuk ukuran kepala desa, uang sebesar itu tidak kecil. Apalagi, desa yang dipimpinnya tidak memiliki sumber ekonomi, kecuali dari hasil pertanian yang juga tidak seberapa. Beberapa petak sawah yang akan diterima dari desa sebagai imbalan jabatannya, hitung-hitung, hasilnya tidak akan mampu mengembalikan uang yang telah dibelanjakan untuk membiayai pemilihan yang baru saja dimenangkan itu.

Namun begitu ia masih merasa untung, berhasil menang. Tidak terbayang bagi pesaingnya yang kalah. Mereka akan kecewa karena kekalahannya itu, namun juga masih harus menanggung rugi, telah mengeluarkan uang yang tidak kecil. Semua calon harus membiayai kompetisi, baik biaya resmi maupun yang tidak resmi. Semangat meraih kemenangan menjadikan mereka kehilangan rasionalitasnya. Tatkala uang tidak mencukupi, maka pinjampun ditempuh. Padahal untuk membayar kembali hutangnya itu belum tentu terbayang dari mana sumbernya.

Maka, baik yang menang maupun yang kalah dalam pemilihan kepala desa sama-sama kebingungan. Bagi yang menang masih lebih untung, ia terhibur dengan kemenangannya, mendapatkan ucapan selamat dari pendukung dan simpatisannya. Tetapi bagi yang kalah akan menghitung kerugian, dan bisa jadi masih disalahkan oleh keluarganya, mengapa ikut-ikutan mencalonkan diri. Penyesalan biasanya dirasakan setelah mengalami kegagalan seperti itu.

Kasus pemilihan kepala desa dengan berbagai suka duka dan resikonya seperti itu, sebenarnya merupakan gambaran sederhana dari keseluruhan yang terjadi di negeri ini. Bisa dibayangkan betapa banyak jumlah pemilihan kepala desa pada setiap tahunnya di berbagai daerah. Masa jabatan kepala desa juga terbatas, yakni hanya enam tahun. Maka setiap saat peristiwa seperti itu terjadi, dan artinya keluh kesah dan berbagai akibatnya selalu muncul di mana-mana. Belum lagi pemilihan jabatan politik lainnya, seperti bupati dan walikota, gubernur dan DPRD.

Pemilihan bupati, wali kota, gubernur dan juga DPRD bisa jadi juga melahirkan kegalauan serupa. Sekalipun jumlah itu tidak sebanyak kepala desa, tetapi dihitung secara nasional cukup besar. Jumlah itu akan semakin bertambah lagi dengan pemilihan calon anggota legislatif, baik tingkat kabupaten kota dan juga propinsi. Tentu apa yang dirasakan oleh kepala desa tersebut juga akan dirasakan dan dialami oleh pejabat pada level yang lebih tinggi itu. Bedanya hanya dari jumlah dana yang harus dibelanjakan, semakin tinggi akan semakin besar.

Sekedar duduk di kursi jabatan politik di negeri ini ternyata tidak murah. Kursi itu selalu berharga tinggi. Padahal seorang pemimpin memiliki tugas berat yaitu mensejahterakan rakyatnya. Perubahan-perubahan harus terjadi selama kepemimpinannya. Apalagi, tatkala berkampanye banyak janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat. Janji itu tentu akan ditagih. Rakyat tidak akan peduli, bahwa pemimpin baru itu harus berusaha keras mencari uang kembalian yang telah dikeluarkan sebelumnya. Janji adalah janji, dan harus dibayar.

Memimpin adalah tugas berat. Mereka tidak saja harus menunaikan tugas-tugasnya, tetapi juga harus menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, untuk mencari dana pengembalian biaya pemilihan tidak akan mungkin dilakukan dengan cara-cara normal, misalnya dari gaji yang diterima setiap bulan. Belum lagi bahwa seorang pejabat politik juga harus menanggung biaya sosial yang juga tidak sedikit. Itulah yang menambah beban berat sebagai seorang pejabat, mulai dari tingkat desa hingga level yang paling tinggi.

Gambaran seperti itu kiranya yang menjadikan para pejabat rawan melakukan penyimpangan. Orang yang semula baik, dikenal alim, peduli dengan tetangga dan juga sesama, ternyata tiba-tiba menjadai tersangka dan bahkan menjadi penghuni penjara. Nasib buruk yang dialami itu disebabkan oleh karena mereka masuk pada wilayah tidak aman. Mereka menghadapi dua pilihan, antara mengabdikan dan sekaligus berkorban, atau mengabdikan tetapi tetap berharap mendapat untung. Pilihan pertama akan selamat. Tetapi hal itu tidak mudah, hingga terpaksa kemudian mengambil pilihan kedua, dan akhirnya akan sial di kemudian hari.

Semua orang tahu tentang resiko transaksi-transaksi perebutan kekuasaan, baik terhadap yang bersangkutan maupun rakyat secara keseluruhan. Bagi yang bersangkutan kerugian itu adalah sebagaimana diungkap di muka, sedang bagi rakyat akan kehilangan nilai-nilai yang seharusnya dijaga bersama. Transaksi untuk meraih jabatan itu akan menjadikan uang sebagai segalanya. Tanpa uang apapun tidak akan jalan. Keadaan itu akan melemahkan semangat kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan dan seterusnya. Itulah sebagian dari hal yang dirisaukan oleh kebanyakan masyarakat, hingga seringkali melahirkan pertanyaan, bagaimana gambaran bangsa ini ke depan tatkala semua sudah berjalan atas kebiasaan bertransaksi seperti itu .
Wallahu a'lam